



SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI KEPALA BPSDM PROVINSI SE-INDONESIA
BANDA ACEH, 24-26 JULI 2019

ROCHAYATI BASRA
KEPALA PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
BPSDM KEMENDAGRI

ARAHAN BAPAK PRESIDEN

“MEMBANGUN HUBUNGAN TATA KELOLA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH YANG LEBIH EFEKTIF, EFISIEN, TAAT KEPADA HUKUM, MEMPERCEPAT REFORMASI BIROKRASI, DALAM UPAYA PENGUATAN OTONOMI DAERAH”



PEMBANGUNAN SDM MENJADI PRIORITAS PEMERINTAH



Presiden Jokowi: Mulai 2019, Kita Konsentrasi pada Pembangunan SDM.



KONDISI UMUM SDM APARATUR

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2019

KONDISI UMUM ASN

PERSEBARAN



INSTANSI PUSAT

22,4% (939,236 JIWA)



INSTANSI DAERAH

77,6% (3,246,267 JIWA)



SEKOLAH DASAR

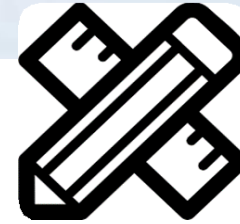
0,7% (29,862 JIWA)

SEKOLAH
MENENGAH
PERTAMA

1,3% (53,787 JIWA)

SEKOLAH MENENGAH
ATAS

20,6% (861,989 JIWA)



DIPLOMA I

1,0% (42,615 JIWA)

DIPLOMA II

4,2% (174,656 JIWA)

DIPLOMA III

9,4% (391,599 JIWA)



Diploma IV/Strata-1

53,3% (2,231,492 jiwa)

STRATA-2

9,0% (378,220 JIWA)

STRATA-3

0,5% (21,283 JIWA)

DOMINASI PENDIDIKAN



LAKI-LAKI

49%

(2,050,896 JIWA)



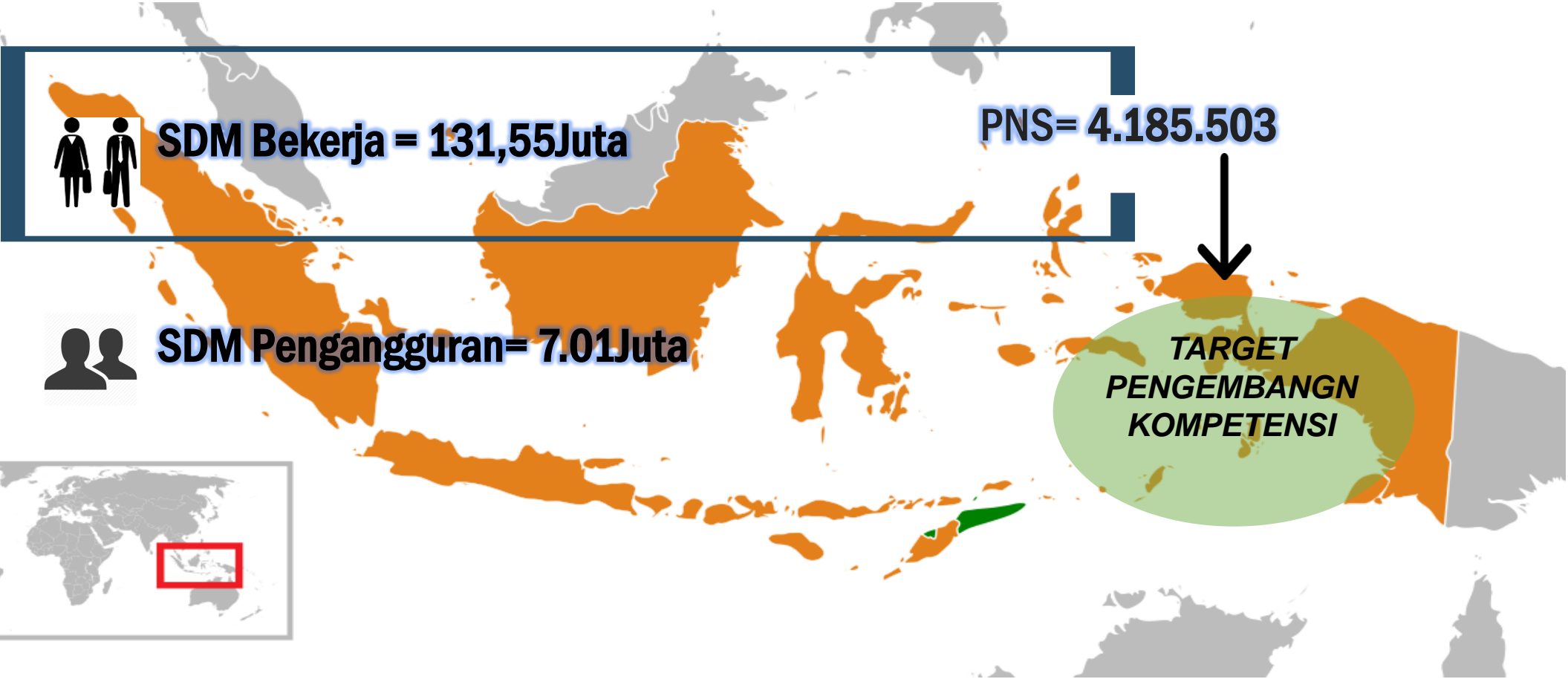
PEREMPUAN

51%

(2,134,607 JIWA)

GENDER

PROFIL SDM INDONESIA



Data BKN 2019

KONDISI SDM ASN SAAT INI

TENAGA SPESIALIS MASIH TERBATAS



HANYA 10% ASN DENGAN JABATAN JF TEKNIS (DI LUAR GURU DAN TENAGA MEDIS) DIBANDINGKAN DENGAN 38% JF UMUM/ADMIN DAN 11% STRUKTURAL

KETIDAKSESUAIAN ANTARA POTENSI DAERAH DENGAN KOMPETENSI ASN SETEMPAT



HANYA 0.06% ASN DI KALIMANTAN DENGAN LATAR BELAKANG PERMINYAKAN/PERTAMBANGAN/GEOLOGI; HANYA 0.1% ASN DI SULAWESI BERLATAR BELAKANG PERIKANAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI BELUM SESUAI KEBUTUHAN DAERAH



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEPERTI DIKLAT CENDERUNG MEMBEBANI ANGGARAN DAERAH KARENA DURASI PEMBELAJARAN YANG PANJANG DAN MEMAKAN WAKTU LAMA

TUMPANG TINDIH PENGEMBANGAN KOMPETENSI



TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DISINYALIR TUMPANG TINDIH SUBSTANSINYA SEHINGGA MEMBUAT BINGUNG DAERAH DAN SEMAKIN MEMBEBANI ANGGARAN

PERMASALAHAN RENDAHNYA KOMPETENSI ASN



ANTARA 60-64 % KOMPETENSI PNS
KEMAMPUANNYA HANYA JURU KETIK.



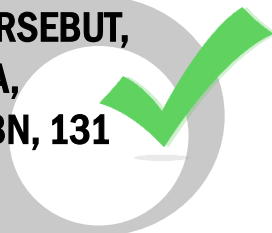
KETERBATASAN KOMPETENSI & KESEMPATAN
MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI ASN
BERPENGARUH KEPADA KINERJA PEMERINTAH -PUSAT
MAUPUN DAERAH

62 % PNS HANYA MEMPUNYAI
KEMAMPUAN ADMINISTRATIF.



PENERAPAN *REWARD AND PUNISHMENT*
BAGI KINERJA SDM

KETERBATASAN KOMPETENSI PNS - DAN UMUMNYA ASN TERSEBUT,
NEGARA MENGALAMI KERUGIAN UNTUK DUA HAL. PERTAMA,
TERKAIT DENGAN BELANJA PEGAWAI 26,1% DARI TOTAL APBN, 131
DAERAH >50 % APBD. KEDUA, TERKAIT DENGAN KINERJA
PEMERINTAH.



*KOMPETENSI BELUM MENJADI DASAR
BAGI POLA KARIR (PROMOSI,
PENEMPATAN, ROTASI JABATAN, DLL)*

ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2019-2024

Sumber: Pidato Presiden tentang Visi Indonesia

PIDATO PRESIDEN TERPILIH: VISI INDONESIA 2019-2024



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN SDM (VOCATIONAL TRAINING, VOCATIONAL SCHOOL, MEMBANGUN LEMBAGA MANAJEMEN TALENTA INDONESIA)

INVESTASI YANG SELUAS-LLUASNYA DALAM RANGKA MEMBUKA LAPANGAN KERJA

BIROKRASI (KECEPATAN MELAYANI DAN KECEPATAN MEMBERI IZIN) REFORMASI

PENGGUNAAN APBN YANG FOKUS DAN TEPAT SASARAN

TEMPO.CO
PIDATO JOKOWI
ENAM POIN
VISI INDONESIA

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan Visi Indonesia pada Ahad, 14 Juli 2019. Pada acara yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat tersebut, Jokowi menyampaikan visi pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin di periode 2019 - 2024.

1
INFRASTRUKTUR

Jokowi mengatakan akan meneruskan pembangunan infrastruktur. Menurut Jokowi, infrastruktur-infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara, akan dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian, seperti pusat produksi masyarakat, kawasan ekonomi khusus, industri kecil, dan pariwisata.

Dia juga berjanji bakal memastikan koneksi infrastruktur-infrastruktur besar dengan persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.

2
SUMBER DAYA MANUSIA

Jokowi mengatakan akan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita, dan anak sekolah. Dia juga berjanji bakal meningkatkan kualitas pendidikan dan vokasional.

Selain itu, Jokowi mengatakan akan membentuk manajemen talenta nasional. Dia berujar, hal ini demi menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap menghadapi diaspora dan persaingan global.

3
INVESTASI

Jokowi mengatakan akan membuka keran investasi seluas-luasnya. Dia berkata investasi menjadi salah satu kunci membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jokowi meminta tak ada lagi yang alergi terhadap investasi.

4
BIROKRASI

Ia mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat dan terbukti melakukan pungutan liar atau pungli. Ia menyebut bakal membubarkan lembaga-lembaga yang tak efisien dan bermasalah.

Jokowi mengatakan, di periode kedua nanti dia bakal memastikan birokrasi efektif dan efisien. Dia ingin nantinya lembaga-lembaga menjadi lebih sederhana, simpel, dan lincah.

5
APBN

Jokowi mengatakan bakal menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan dengan fokus dan tepat sasaran

6
OPOSISI

Menurut Jokowi menjadi oposisi juga hal mulia dalam demokrasi. Namun Jokowi meminta agar pilihan oposisi itu tak menimbulkan dendam dan kebencian. Dia meminta agar pilihan itu juga tak disertai cacian, hinaan, dan makian.



MANAJEMEN TALENTA
PENGELOLAAN SDM APARATUR
BERDASAR BAKAT ALAMIAH
SESEORANG, SEHINGGA
DIHARAPKAN MAMPU
BERKOMPETISI SECARA
PROFESIONAL DAN INOVATIF
SESUAI KOMPETENSINYA



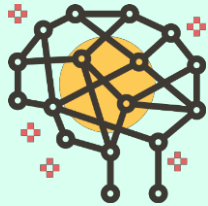
SDM

TIDAK TERJEBAK RUTINITAS
BERINOVASI
TIDAK MONOTON
POLA PIKIR LAMA
BEKERJA LINIER
ZONA NYAMAN

MANAJEMEN TALENTA ASN



1 **PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL** MEMERLUKAN BIROKRASI YANG DIDUKUNG SDM APARATUR YANG KOMPETEN.



2 **REVOLUSI INDUSTRI 4.0** MENUNTUT RESPON SEKTOR PUBLIK DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM, YANG HARUS SAMA BAIKNYA DENGAN SEKTOR PRIVAT.



3 **GLOBALISASI DAN KETERBUKAAN EKONOMI GLOBAL** MENUNTUT PENINGKATAN SDM APARATUR YANG BERDAYA SAING TINGGI.



4 **FUTURE OF GOVERNANCE (DIGITAL GOVERNMENT + CITIZEN CENTRIC)** MENJADI KEPASTIAN KERJA BIROKRASI MASA DEPAN YANG MESTI DIHADAPI.



5 **PERFORMA PEMERINTAH** MASIH PERLU DITINGKATKAN DENGAN MENGACU BEBERAPA INDEKS GLOBAL.

□ **GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS INDEX 2019:** INDONESIA (**RANK 67** DARI 100 NEGARA); JAKARTA (**RANK 100** DARI 100 KOTA BESAR DUNIA)

□ **GLOBAL HUMAN CAPITAL INDEX 2018:** INDONESIA (**0,53**), LEBIH RENDAH DARI MALAYSIA (0,62)

□ **GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 4.0 2018:** INDONESIA (**RANK 45** DARI 140 NEGARA)

Indonesia

20
45

Berdaulat, Maju,
Adil, dan Makmur



Manusia Indonesia unggul,
berbudaya, dan menguasai iptek



SDM ASN yang
profesional dan
berintegritas

STRATEGI PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI APARATUR PEMDAGRI

PELAKSANAAN OLEH KEMENDAGRI MELALUI BPSDM (LSP-PDN)



“PROGRAM YANG SIFATNYA RUTINITAS DAN BASA BASI DIUBAH MENJADI PROGRAM YANG LEBIH EFEKTIF DAN OUTPUTNYA JELAS, TEPAT SASARAN “

TJAHJO KUMOLO
MENDAGRI



LABORATORIUM
PENGEMBANGAN
SDM APARATUR

AGP
KOMPETENSI

TALENTA

KOMPETENSI
PEMERINTAHAN
MELALUI SERTIFIKASI
KOMPETENSI

KEMENDAGRI

BPSDM MELALUI
LSP-PDN



UU 23/2014
TTG PEMDA





PAYUNG HUKUM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMDAGRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG APARATUR
SIPIIL NEGARA (ASN)
No. 5 Tahun 2014

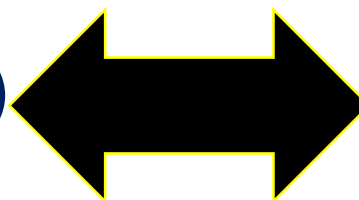


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

**UU NO.
5/2014**

**UU NO.
23/2014**



PP 11/2017

**79,5 % ASN
ada di Daerah**

PP 18/2016

PP 12/2017

DISINERGIKAN!

JANGAN

DIPERTENTANGKAN !

STRUKTUR LSP-PDN BERADA DI KEMENDAGRI DAN 30 PROVINSI, 4 PROVINSI TAHAP PENYUSUNAN PERGUB PEMBENTUKAN LSP-PDN PROVINSI (ACEH, SUMUT, JATIM DAN PAPUA);

JUMLAH ASESOR 777 ORANG. PEMBERDAYAAN ASESOR BARU 5% DARI TOTAL ASESOR, HAL INI TERKAIT PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DIALOKASIKAN DI BEBERAPA PROVINSI

LSP-PDN



YANG AKAN DILAKUKAN T.A. 2020

- _STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (JABATAN PER SATKER)**
- _PERLU AFIRMASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN BAGI SEKDA**
- SISTEM UJK BERBASIS TEKNOLOGI (TERBATASNYA SARPRAS DAN BIAYA)**

TANTANGAN

- JUMLAH PEJABAT DAERAH LEBIH KURANG 255.000 ORANG**
- PEJABAT DAERAH YANG TELAH TERSERTIFIKASI LEBIH KURANG 5.100 ORANG (2%)**
- PEJABAT FUNGSIONAL YANG TELAH TERSERTIFIKASI KURANG LEBIH KURANG 7.200 ORANG**

- _SERTIFIKASI PEJABAT DAERAH DI 33 PROVINSI DENGAN TARGET 6.600 ASESI MELALUI PROGRAM DEKONSENTRASI**
- _ALTERNATIF, BILA PROGRAM DEKONSENTRASI TIDAK ADA, DILAKUKAN PILOT PROJECT SERTIFIKASI PEJABAT DAERAH PADA 2 PROVINSI (LAMPUNG DAN KALTIM)**
- RAPAT KOORDINASI BAGI ASESOR DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KOMPETENSI DAN PENINGKATAN MUTU PERANGKAT SERTIFIKASI**

SERTIFIKASI KOMPETENSI

DASAR HUKUM	JENIS KOMPETENSI	PENANGGUNG JAWAB	STANDAR	SERTIFIKASI
UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA	TEKNIS	K/L	BEBERAPA K/L	?
	MANAJERIAL	?	?	?
	SOSIO KULTURAL	?	?	?
DASAR HUKUM	JENIS KOMPETENSI	PENANGGUNG JAWAB	STANDAR	SERTIFIKASI
UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAHAN	KEMENDAGRI MELALUI BPSDM KEMENDAGRI (LSP-PDN)	PERMENDAG RI 108/2017	DILAKSANAKAN BERTAHAP: <input type="checkbox"/> SERTIFIKASI JPT PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS KURANG LEBIH 5.100 ORANG (2%) <input type="checkbox"/> PEJABAT FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI KURANG LEBIH 7.200 ORANG

**TINDAK LANJUT
PEMERINTAH DAERAH**



ASN Kompeten



- TINGKAT PENDIDIKAN
- PELATIHAN STRUCTURAL/
MANAJEMEN
- PENGALAMAN MEMIMPIN



- PENGALAMAN KERJA
BERKAITAN DG
MASYARAKAT
MAJEMUK DLM HAL
SUKU, AGAMA &
BUDAYA SEHINGGA
MEMILIKI WAWASAN
KEBANGSAAN

• ??????

NEXT

- SPESIALISASI
PENDIDIKAN
- PELATIHAN TEKNIS
FUNGSIONAL
- PENGALAMAN
KERJA



UU 5 Tahun 2014

UU 23 Tahun 2014



Kompetensi Pemerintahan



Permendagri No. 108 Tahun 2017

A large, stylized red graphic consisting of two wavy, overlapping bands that sweep across the top half of the page. The word "TERIMA KASIH" is centered within the white space between these bands.

TERIMA KASIH

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (LSP-PDN)**

**Jalan TM Pahlawan No.8 Kalibata Jakarta Selatan
Telp/Fax (021)7943420
www.bpsdm.kemendagri.go.id**